

ANALISA KETERSEDIAAN DATA SDGs DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Gerhana Adjie¹, Roberta Zulfhi Surya²

¹STIE Indragiri, Rengat, Indragiri Hulu, Riau

²SDGs Center Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau

Email: gerhanaadjie@stieindragiri.ac.id

Abstract

Presidential Decree No. 59 Year 2017 on the implementation of the SDGs in Indonesia is mandatory and request the stakeholder's commitment. Integrating SDGs into development planing requires reliable data and statistical. This researsch aims to determine the avaiability of data that in line with SDGs. Base on this research obtained information that available 65 data in line with SDGs Indicator, consists of 60 data items TIER I and 5 data items will be Developed indicator cause out of the district authority.

Keywords: Data, Statistical, SDGs, Planing, Development

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersifat mandatory dan meminta komitmen seluruh stakeholder untuk mengimplementasikan SDGs. Integrasi SDGs dalam penyusunan perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data SDGs di Kabupaten Indragiri Hulu yang relevan dengan SDGs. Berdasarkan kajian ini diperoleh informasi terdapat 65 data Indikator SDGs yang tersedia dan terdisagregasi dengan baik yang terdiri dari 60 indikator TIER I dan 5 Indikator will be Developed karena letak kewenangannya bukan berada di level Kabupaten

Kata kunci: Data, Statistik, SDGs, Perencanaan, Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah menyepakati penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan menunjukkan komitmen dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [1]. untuk itu, integrasi SDGs dalam penyusunan perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik sehingga ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan kunci keberhasilan perencanaan. Penggunaan terpenting data dalam proses perencanaan adalah untuk menyediakan target-target pembangunan (gambar 1).



Gambar 1. Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penggunaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan diatur dalam kerangka hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pasal 31, berbunyi bahwa perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 152 ayat 1, berbunyi bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Tata-cara Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

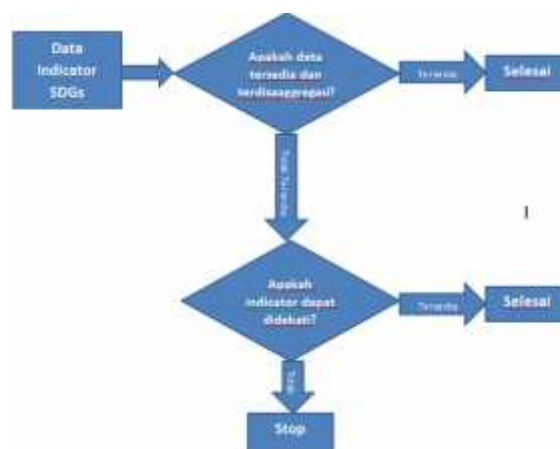
SDGs/TPB menawarkan target pembangunan yang spesifik, terikat waktu dan dapat diukur yang sinkron dengan rencana dan prioritas pembangunan. Sebagian besar data SDGs membutuhkan disagregasi (pengumpulan) data berdasarkan lokasi, jenis kelamin, usia, pendapatan dan dimensi relevan lainnya. BPS sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data melalui publikasi berjudul Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2014 menerangkan bahwa Sumber Data, Periodisasi, Level Penyajian, dan Disagregasi Indikator SDGs yang Tersedia di Indonesia terdapat 72 Indikator. Dan ketersediaan data di Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau dengan dukungan UNDP telah melaksanakan Penyusunan Sistem Pengelolaan Data SDGs Provinsi Riau terdapat 272 indikator SDGs Provinsi Riau dengan penjabaran menurut cluster data sebagai berikut [2]:

- a. TIER I (available and accessible) ditemukan sebanyak 112 indikator atau 41 persen. Indikator pada TIER I dinyatakan data indikator tertelusur dengan baik dan sesuai dengan judul indikator yang disusun dan rutin dipublikasi oleh penyedia data.
- b. TIER II ditemukan sebanyak 33 indikator atau 12%, dimana komponen indikator tersedia (available) tetapi masih memerlukan perhitungan lanjutan untuk mendapatkan indikator sesuai judul indikator yang disusun oleh POKJA SDGs Provinsi Riau.
- c. TIER III (un-available) ditemukan sebanyak 127 indikator atau 47 persen, dimana data indikator tidak ditemukan judul indikator tersebut dalam beberapa sumber statistik, baik secara langsung maupun komponen pengukuran indikator tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dengan difasilitasi oleh Pejabat terkait dilaksanakan diskusi dengan BPS dan roadshow ke

beberapa OPD terkait inisiatif manajemen data SDGs Kabupaten Kuantan Singingi dengan metode yang digunakan adalah screening data (gambar 2).



Gambar 1. Metode Screening ketersediaan data SDGs. [3]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab atas ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 juga menegaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab penuh atas tersedianya statistik dasar. Statistik dasar adalah statistik yang ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, berciri lintas-sektoral, berskala nasional, dan makro. Jenis statistik ini diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab BPS. Selain bertanggung jawab terhadap statistik dasar, BPS juga mempunyai tugas untuk membantu OPD dalam penyediaan statistik sektoral yang dimana nanti hasil akhirnya juga harus diserahkan oleh OPD kepada BPS. BPS dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu setiap tahun melaksanakan MoU untuk melaksanakan penyusunan dan penerbitan buku statistik daerah yaitu:

1. Buku Data dan Informasi Pembangunan Indragiri Hulu [4]
2. Buku Analisis Sektoral Kabupaten Indragiri Hulu [5]
3. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu [6]
4. Buku Statistik Inflasi Kabupaten Indragiri Hulu [7]

Keempat publikasi tersebut di atas dapat diakses pada tautan

<https://inhukab.bps.go.id> sedangkan OPD pada umumnya menerbitkan data offline dan diakses langsung ke kantor masing-masing. Dengan difasilitasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan diskusi dengan BPS dan roadshow ke beberapa OPD terkait inisiatif manajemen data SDGs Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan untuk screening data terdapat pada gambar 2 di atas.

Dengan metode screening data di atas (gambar 2) diperoleh informasi terdapat 65 data Indikator SDGs yang tersedia dan terdisagregasi dengan baik yang terdiri dari 60 indikator TIER I dan 5 Indikator will be Developed karena letak kewenangannya bukan berada di level Kabupaten. Berikut pada lampiran disajikan Ketersediaan data Indikator SDGs di Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan difasilitasi Pejabat terkait dilaksanakan diskusi dengan BPS dan roadshow ke beberapa OPD terkait inisiatif manajemen data SDGs Kabupaten INHU dengan metode screening data. Diperoleh informasi terdapat 65 data Indikator SDGs yang tersedia dan terdisagregasi dengan baik yang terdiri dari 60 indikator TIER I dan 5 Indikator will be Developed karena letak kewenangannya bukan berada di level Kabupaten. Ketersediaan data Indikator SDGs di Kabupaten INHU dapat dilihat pada file lampiran Ketersediaan Data INHU. Jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu tentang hasil analisa keselarasan terhadap Revisi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 28 Indikator Similar atau setara dengan 13%, 30 Indikator Proxy atau setara dengan 14% dan 162 Indikator will be developed atau setara dengan 73% [8]. Maka dengan kata lain Kabupaten Indragiri Hulu telah selangkah lebih maju dalam integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kendala dalam pengelolaan data SDGs di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Disagregasi data yang diterbitkan oleh BPS dan OPD berbeda dengan disagregasi data SDGs, Disagregasi data SDGs lebih detail;
2. Terdapat perbedaan formula/rumus perhitungan data;
3. Belum adanya regulasi ditingkat daerah untuk penerbitan data base SDGs yang terintegrasi, baik online maupun offline. Saat ini Data SDGs dipublikasikan terpisah dari berbagai publikasi statistik, baik diterbitkan BPS, OPD, dan kerjasama BPS-Pemda;

4. Belum terbentuknya forum data pembangunan di level kabupaten.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian ini diperoleh informasi terdapat 65 data Indikator SDGs yang tersedia dan terdisagregasi dengan baik yang terdiri dari 60 indikator TIER I dan 5 Indikator will be Developed karena letak kewenangannya bukan berada di level Kabupaten.

Rekomendasi untuk manajemen data SDGs di Kabupaten INHU untuk perencanaan pembangunan yaitu:

1. Pembentukan database SDGs yang terpublikasi dengan baik dan up to date. Sehingga proses perencanaan pembangunan (khususnya penyusunan RPJMD) tidak terkendala;
2. Pembentukan forum data pembangunan di Kabupaten;
3. BPS perlu mempertimbangan untuk perluasan cakupan pengumpulan data sesuai metadata SDGs.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih Kepada UNDP Indonesia, Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu, BPS Indragiri Hulu dan Dinas Komunikasi dan Informatika Indragiri Hulu. Penelitian ini diambil dari Deliverable 6th District Facilitator SDGs Localization at Riau Province, Data Management Initiative at INHU and KUANSING.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- [2] Bappeda Riau. Sistem Pengelolaan Data SDGs Provinsi Riau [Report], Pekanbaru, UNDP Indonesia & Bappeda Riau, 2018
- [3] UNDP, Deliverable 6 District Facilitator SDGs Localization in Riau, SDGs Data Management Initiative, [Report], 2019
- [4] BPS Inhu, Buku Data dan Informasi Pembangunan Indragiri Hulu, 2017
- [5] BPS Inhu, Buku Analisis Sektorial Kabupaten Indragiri Hulu, 2017
- [6] BPS Inhu, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, 2017
- [7] BPS Inhu, Buku Statistik Inflasi Kabupaten Indragiri Hulu, 2017
- [8] Afrida, I. Basyari, Analisa Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hulu 2016 – 2021, Jurnal Selodang Mayang, Vol 4 No 3 Desember 2018.

Lampiran Ketersediaan data SDGs di Kabupaten Indragiri Hulu.

Indikator TPB /SDGs	Sumber Data	Periodes asi	Disaggregasi
GOAL 1 - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun			
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS	Tahunan	1. Garis Kemiskinan Makanan 2. Garis Non-Kemiskinan Makanan
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPS (Statistik Kesejahteraan)	Tahunan	Jenis jaminan sosial
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	BPS (Statistik Kesejahteraan)	Tahunan	-
1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Jenis Sarana Jamban 3. Wilayah Kerja Puskesmas
1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	BPS, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Kategori Kumuh 3. Luas areal
1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten
1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten
1.4.1 (i) Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat (Indikator wille developed)	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten
1.4.1 (j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten
1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah (Kejadian bencana)	Kantor Penanggulangan Bencana	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kecamatan Jenis bencana
GOAL 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan			
2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas 3. Jenis Kelamin
2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	BPS, Dinas Ketahanan Pangan	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten
2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan	BPS, Dinas	Tahunan	Komoditas

Indikator TPB/SDGs	Sumber Data	Periode asasi	Disaggregasi
asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Ketahanan Pangan		
2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas 3. Jenis Kelamin
GOAL 3- Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia			
3.1.1 Jumlah Kematian yang terdata (terlaporkan)	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi 2. Penyebab
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas
3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	BPS, Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi 2. Penyebab
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	BPS, Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan	Tahunan	Kelompok Umur
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas 3. Jenis Kelamin
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas 3. Jenis Kelamin
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah

Indikator TPB/SDGs	Sumber Data	Periodesasi	Disaggregasi
penduduk umur ≥ 18 tahun.			Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas 3. Jenis Kelamin
1.6.1. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas (Indikator will be developed)	BPS, POLRES Inhu	Bulanan	1. Kerugian Material 2. Korban
3.8.1 (a) Unmeet need Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tahunan	Wilayah Administrasi
3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Jenis Jaminan 2. Jenis Kelamin
3.b.1 (a) Presentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten Kuansing
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	BPS, Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Jenis Tenaga Kesehatan 2. Tenaga Paramedis Perawatan 3. Tenaga Paramedis Non Perawatan
GOAL 4- Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat manusia			
4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat (Indikator Will be Developed)	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik.	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi 2. Tingkat Pendidikan
GOAL 5- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan			
5.3.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen (tingkat pusat, parlemen daerah)	Setwan, BPS, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	5 Tahunan	Jenis Kelamin

Indikator TPB/SDGs	Sumber Data	Periodesasi	Disaggregasi
	Perlindungan Anak		
5.6.1 (a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi).	BPS, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas 3. Jenis Kontrasepsi
5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BPS (Statistik Kesejahteraan)	Tahunan	1. Pendidikan 2. Kuintil Pengeluaran
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS (Statistik Kesejahteraan)	3 Bulanan	1. Jenis Kelamin 2. Pendidikan 3. Kuintil Pengeluaran
Goal 6- Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua			
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPAM, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah kerja Puskesmas 3. Perpipaan/bukan Perpipaan
6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan	Tahunan	1. Wilayah Administrasi: Kecamatan 2. Wilayah Kerja Puskesmas
Goal 7- Mejamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berlanjutan dan Modern			
7.1.1* Rasio Elektrifikasi (Indikator Will Be Developed)	PLN	Tahunan	1. PLN/Non PLN 2. Jumlah Pelanggan
Goal 8- Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang Layak bagi semua			
8.1.1.(a) PDB per kapita.	BPS		
8.3.1. (a) Persentase tenaga kerja formal	BPS, Dinas Tenaga Kerja	Tahunan	lapangan kerja
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (indikator will be developed)	BPS, Dinas Tenaga Kerja	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Tahunan	*)Penyediaan Akomodasi (Sesuai Metadata)
8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Tahunan	*)Menginap di Akomodasi (Sesuai Metadata)

Indikator TPB/SDGs	Sumber Data	Periodesasi	Disagregasi
Goal 9- Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi			
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPS	Tahunan	1. Jenis Permukaan jalan (Aspal, Rigid, Sirtu, tanah) 2. Panjang
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, BPS	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS (Statistik Kesejahteraan)	3 Bulanan	1. Jenis Kelamin 2. Pendidikan 3. Kuintil Pengeluaran
Goal 11- Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan			
11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tahunan	Wilayah Administrasi: Kabupaten
11.7.1 (a) Jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahunan	1. Luas RTH 2. Taman Kota 3. Hutan Kota 4. Median Jalan dll
Goal 12- Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan			
12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	BPS, Dinas Lingkungan Hidup	Tahunan	Jenis Kegiatan Perusahaan
GOAL 16- Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan			
16.1.3 (a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Polres, BPS	Tahunan	Jenis Tidak Pidana
16.6.1.(a) Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Tahunan	Tingkat Pemerintahan : Kabupaten
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Bappedalitbang, Inspektorat	Tahunan	Tingkat Pemerintahan : Kabupaten
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahunan	Wilayah Administrasi
16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
Goal 17- Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk			

Indikator TPB/SDGs	Sumber Data	Periode asi	Disaggregasi
pembangunan berkelanjutan			
17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS, Badan Pendapatan Daerah	Tahunan	Jenis Penerimaan
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPS, Badan Pendapatan Daerah	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten
17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS (Statistik Kesejahteraan)	3 Bulanan	1. Jenis Kelamin 2. Pendidikan 3. Kuintil Pengeluaran
17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistic (Indikator Will be Developed)	BPS	Tahunan	Wilayah Administrasi : Kabupaten